



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan  
Pariwisata  
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
<b>Predikat</b>		<b>A</b>	<b>88</b>

**Catatan**

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Belum disusunnya Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata disebabkan belum adanya Pedoman Penyusunan Renstra Unit Eselon I, II dan UPT dilingkungan Kemendikdasmen yang selaras dengan Renstra Kemdikdasmen Tahun 2025-2029 (Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025). dan Renstra Eselon I Ditjen Diksi PKPLK masih berupa draft dan belum ditandatangani/ disahkan oleh Dirjen Diksi PKPLK
2. Terdapat IKK yang ditetapkan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berbeda dengan IKK dalam Renstra Ditjen Diksi PKPLK termasuk satuannya, diantaranya IKK 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi **dengan mutu yang terpetakan**, dalam Renstra (hal 122) Jumlah satuan pendidikan vokasi **yang meningkat mutunya**; IKK 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi **yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja** dengan satuan **rekomendasi kebijakan**, dalam Renstra (hal 122) Jumlah model pembelajaran vokasi **hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi** dengan satuan **model**. Terkonfirmasi perbedaan terjadi antara RKAKL dengan Renstra kementerian, telah dikonfirmasi dengan Eselon I (Ditjen Diksi PKPLK).
3. Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum tercapai dengan baik meskipun capaian kinerja selalu terpantau secara berkala triwulanan, Hal ini nampak pada tidak selaras antara Rencana Aksi dan Hasil Pengukuran Kinerja Triwulanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025 dimana target triwulan II dan III tidak tercapai (selisih cukup signifikan). Terkonfirmasi akan tercapai pada akhir tahun 2025.

#### B. Pengukuran Kinerja

- 1. Terdapat Pedoman Pengukuran Kinerja (diterbitkan oleh Biro Perencanaan), akan tetapi belum terdapat Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Satker (uraian dari POS Pengumpulan dan Pelaporan Data Kiner Satuan Kerja). Mekanisme pengumpulan data BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan POS Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Satuan Kerja dan menggunakan Sistem Informasi Capaian Kinerja Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata [http://sikepeg.id/bispar\\_apps](http://sikepeg.id/bispar_apps), penggunaan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



sistem tidak termasuk dalam bagian POS Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja.

- 2. Sesuai Petunjuk Teknis Pemilihan Pegawai Terfavorit, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memberikan reward kepada pegawai terfavorit bukan pegawai berprestasi berdasarkan penilaian yang tidak menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan tidak ada acuan terkait dengan punishment.

### C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah menggambarkan kinerja, telah memenuhi standar dan menggambarkan atas kualitas pencapaian kinerja, terdapat perubahan budaya kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh informasi dalam laporan kinerja.

### D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

## Rekomendasi

### A. Perencanaan Kinerja

1. Untuk menyusun Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata setelah Renstra Ditjen Diksi PKPLK diformalkan dan Pedoman Penyusunan Renstra Unit Eselon I, II dan UPT oleh **Biro Perencanaan** diselaraskan dengan Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 (Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025).
2. Untuk memberikan penjelasan terkait keselarasan IKK BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terkait IKK 1.2 dan IKK 1.3 dan juga satuan dalam RKAKL dengan IKK Eselon 1 Ditjen Diksi PKPLK/ IKK Kementerian. Jika sudah definitif untuk disinkronkan dalam semua dokumen perencanaan (DIPA, RKAKL, KAK dan RAB, Perjanjian Kinerja).
3. Untuk menyusun strategi yang cukup signifikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pencapaian target khususnya untuk Triwulan IV, sehingga target tahun 2025 tetap tercapai dan melampirkan hasil pencapaian di triwulan IV (Laporan Kinerja triwulan IV).

### B. Pengukuran Kinerja

1. Untuk menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Satker (uraian dari POS Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Satuan Kerja) dan penggunaan Sistem Informasi Capaian Kinerja Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata [http://sikepeg.id/bispar\\_apps](http://sikepeg.id/bispar_apps) untuk menjadi kesatuan dalam bagian POS Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja.
2. Untuk menyusun Petunjuk Teknis terkait Reward dan Punishment kepada pegawai dengan salahsatu kriteria acuan penilaian pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan/atau punishment.

### C. Pelaporan Kinerja

Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian dalam setiap kriteria Pelaporan Kinerja bahwa pelaporan kinerja telah menggambarkan kinerja, telah memenuhi standar dan menggambarkan atas kualitas pencapaian kinerja, terdapat perubahan budaya kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh informasi dalam laporan kinerja.

### D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian dalam setiap kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jakarta, 11 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Inspektur I

Subiyantoro



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**